



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN
SAKSI PEMOHON 203/PUU-XXIII/2025
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 7 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua, Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) yang diwakili oleh Kustiwa Adinata selaku Ketua (Pemohon III), dkk.

PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili oleh Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina, dkk.

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon 203/PUU-XXIII/2025 (VI)

**Selasa, 7 April 2026, Pukul 10.28 – 11.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025:**

1. Mufida
2. Hana Prada Juwita Saragih

B. Pemohon Permohonan Nomor 213/PUU-XXIII/2025:

1. Wahyu Azi Syaputra
2. Hadi Saputra

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dan 213/PUU-XXIII/2025:

1. Dhona El Furqon
2. Lalu Akhmad Laduni
3. Mulya Sarmono

D. Ahli dari Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dan 213/PUU-XXIII/2025:

1. Dwi Andreas Santosa

E. DPR:

1. Adjie Jalu
2. Annisha Putri Andini

F. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kementerian Ekon) |
| 2. Rehobot Putra Anugrah | (Kementerian Ekon) |
| 3. Badrus Zaman Al Fikri | (Kementerian Ekon) |
| 4. Arijna Nurin Sofia | (Kementerian Ekon) |
| 5. Khairunnisa Rahimah | (Kementerian Ekon) |
| 6. Jarot Wahyu Wibowo | (Badan Bank Tanah) |
| 7. Dyah Parwitasari | (Kementerian ATR/BPN) |
| 8. Siti Noor Rochmah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 9. Henri Wiradly Hutahaeen | (Kementerian ATR/BPN) |
| 10. Widya Arzil Rigita | (Kementerian ATR/BPN) |
| 11. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 12. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 13. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 14. R.M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 15. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |

16. Rangga Arif Mahadeli
17. Tri Joko Wintolo

(Kementerian Hukum)
(Kementerian Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.28 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:43]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 203 dan 213 Tahun 2025 dibuka dan Persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 203, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:10]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:13]

Kami Kuasa Hukum 203. Hadir, saya Dhona El Furqon, Pak Lalu Akhmad Laduni, Mulya Sarmono, kemudian ada Pak Hadi dari Sawit Watch, Ibu Hana dan Ibu Muna dari Fian, kemudian ada Hildus Asror[sic!] dari Aliansi Petani Indonesia. Dan 213, minus[sic!] Fian, yaitu dari Sawit Watch dan dari Aliansi Petani Indonesia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik. Untuk Kuasa dari DPR, silakan.

6. DPR: ANNISHA ANDINI [01:51]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Walaikumsalam wr. wb.

8. DPR: ANNISHA ANDINI [01:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, dari kami mewakili Annisha Putri Andini dan rekan saya Bapak Adjie Jalu.

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Walaikumsalam wr. wb.

12. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:07]

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari tiga kementerian. Pertama dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hadir Bapak I Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi yang sebentar lagi memasuki ruangan.

Kemudian dari Kementerian ATR Bapak Jarot Wahyu Wibowo, Sekretaris Badan. Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, dan Rahadhi Aji, Kasubdit beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Baik agenda persidangan pada pagi hari ... mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 203. Ini tidak sekaligus 213?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [02:50]

Tidak, Yang Mulia. 203.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Hanya, 203. Baik. Hadir, Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, M.S., Agama Protestan.

Dipersilakan, Prof, maju ke depan untuk mengucapkan sumpah. Akan dipandu Yang Mulia Bapak Doktor Daniel untuk lafal sumpahnya.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Prof, ini Santoso atau Santosa? Santosa, ya, baik. Bapak Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, M.S. Ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya. Tangan kanan dua jari, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

17. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [03:40]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Silakan kembali ke tempat atau langsung ke podium? Prof. Waktunya 10 menit untuk presentasi, nanti dilanjutkan tanya-jawab.

20. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025: DWI ANDREAS SANTOSA [04:15]

Bapak, Ibu Hakim Yang Mulia, Hakim MK Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Sampurasun, rahayu.

Di sini saya akan menyampaikan pandangan terkait impor komunitas pertanian pangan dan dampaknya terhadap petani kecil. Saya pengajar di IPB, tapi sekaligus juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, yang saat ini kepengurusannya ada di 125 provinsi di seluruh Indonesia sehingga day-to-day kami tahu persis apa yang menimpa sedulur-dulur tani kami.

Yang pertama terkait impor pangan, Indonesia mulai membuka secara besar-besaran impor komunitas pertanian pangan saat pemerintah Indonesia menandatangani letter of intent dengan International Monetary Fund pada 15 Januari 1998. Impor pangan dan komoditas pertanian mulai meningkat di tahun 2000-an. Volume impor,

12 komoditas utama yang impornya lebih dari 100 ribu ton terus mengalami peningkatan yang tajam, sebagaimana makalah yang Bapak/Ibu terima dari gambar 1. Peningkatan yang signifikan mulai tahun 2008, yaitu awalnya sebesar 8,3 juta ton dan terus mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya di tahun 2024 sebesar 34,4 juta ton.

Peningkatan impor komoditas pertanian pangan menyebabkan devisa neraca perdagangan sektor tersebut semakin meningkat sebagaimana gambar 2. Berdasarkan nilai, impor komoditas pertanian tanaman pangan terus mengalami peningkatan dari 2,47 miliar US\$ di tahun 2001 dan mencapai rekor tertingginya di tahun 2024 sebesar 19,63 miliar US\$. Hal tersebut menyebabkan devisa neraca perdagangan sektor pertanian tanpa perkebunan terus membesar dari minus 1,83 miliar US\$ menjadi minus 17,11 miliar US\$ dan di tahun 2025 turun karena kita tidak lagi mengimpor beras, sebesar 13,79 miliar US\$. Komoditas yang impornya paling tinggi adalah gandum, yang menyiratkan perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia sebagaimana terlihat di gambar 3. Gandum saat ini menjadi sumber pangan pokok kedua setelah beras dengan konsumsi mencapai 28% total konsumsi pangan pokok. Beras sebagai pangan pokok utama perlahan-lahan tergantikan oleh gandum. Indonesia juga masih melakukan impor beras, baik beras umum maupun beras khusus yang volumenya tergantung produksi nasional di tahun yang bersangkutan, sebagaimana gambar 4.

Impor beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi di tahun 1998, yaitu sebesar 6,4 juta ton. Terkait beras, ketika pemerintah menyatakan Swasembada tahun 2025 kemarin, itu sebenarnya tidak berarti kita tidak impor beras sama sekali. Kita masih impor beras khusus sebesar ... tahun 2025, 454 ribu ton. Saat ini ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas pertanian pangan penting adalah sebagai berikut, gandum 100%, bawang putih 100%, kedelai 97%, susu 82%, gula 70%, daging sapi atau kerbau 50%, jagung 10%, dan beras kisarnya 1,3 sampai 15%. Tergantung apakah kita impor beras umum atau tidak, beras yang kita konsumsi.

Tahun 2020 sampai tahun 2022 kita juga tidak melakukan impor beras umum atau dapat dinyatakan kita swasembada pada saat itu. Di tahun 2025 Indonesia masih mengimpor gandum sebesar 11.760.000 ton, kedelai=8.610.000 ton, gula-tebu=3.930.000 ton, jagung=982.000 ton, bawang putih=542.000 ton, beras=454.000 ton, susu dan kepala susu 349.000 ton, kacang tanah 306.000 ton, daging sapi 234.000 ton, kentang 226.000 ton, ubi kayu=197.000 ton, bawang bombay=104.000 ton, kacang tanah 103.000 ton, serta belasan komoditas pertanian pangan lainnya yang impornya kurang dari 100.000 ton per tahunnya.

Bagaimana dampak impor pangan terhadap petani kecil? Indonesia sebenarnya pernah mencapai swasembada untuk berbagai

komoditas utama, yang saat ini ketergantungan impornya besar. Indonesia pernah mencapai swasembada kedelai hingga tahun 1982, swasembada jagung tahun 1989, swasembada gula 1994, dan swasembada bawang putih 1996. Dibukanya pintu impor komoditas pertanian pangan mulai awal 2000-an telah menghancurkan kemampuan petani untuk memproduksi berbagai komoditas tertentu. Sebagai contoh, kedelai impor dari Amerika Serikat tahun 2000 harganya hanya Rp1.500,00 per kilogram. Sedangkan biaya produksi di Indonesia oleh petani kecil kita, Rp2.500,00 per kilogram. Yang menyebabkan petani kedelai tidak mampu bersaing dengan kedelai impor, sehingga mereka berganti komoditas pangan dengan tanaman lainnya, atau tidak lagi bertani. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan terhadap kedelai impor semakin lama semakin besar, dan saat ini hampir 100% kedelai harus kita impor, baik untuk tempe-tahu maupun kedelai untuk industri atau bungkil.

Saat ini harga kedelai internasional sampai di Pelabuhan Indonesia (CIF), hanya Rp6.900,00 per kilo, sedangkan biaya produksi kedelai di Indonesia mencapai Rp10.000,00 sampai Rp13.000,00 per kilogram. Hal yang sama berlaku untuk semua komoditas pertanian yang kita impor, baik bawang putih maupun susu, maupun daging, dan lain sebagainya.

Kesejahteraan petani terus mengalami penurunan yang diindikasikan dengan peningkatan tajam petani yang berlahan sempit, kurang dari seribu meter persegi kepemilikan lahannya, dan penurunan jumlah rumah tangga petani yang berlahan luas, yang kepemilikan lahannya 2.000 sampai 1 hektare. Dari tabel 1 menunjukkan hal demikian, misalnya petani yang berlahan sempit yang kurang dari 1.000 meter persegi, 10 tahun terakhir ini justru meningkat dari 4.300.000 rumah tangga petani menjadi 7.400.000 rumah tangga petani. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi seperti itu.

Sedangkan petani yang berlahan agak luas, 0,2 sampai 0,5 hektare, juga menurun dari 6,7 ke 6,3. Petani yang berlahan lebih luas lagi, yang lahannya kurang dari 1 hektare sampai setengah hektare, itu juga berkurang dari 4,6 menjadi ke 4,1. Penurunan kesejahteraan petani sangat nyata dari penurunan jumlah rumah tangga petani di semua subsektor dalam 10 tahun terakhir. Subsektor tanaman pangan dalam 10 tahun terakhir menurun 12,3%, subsektor hortikultura menurun 10,4%, subsektor perkebunan menurun 14,8%, subsektor peternakan menurun 7,1%, subsektor perikanan menurun 6,2%, subsektor kehutanan menurun 48,9%, dan jasa pertanian yang dikelola oleh petani kecil itu menurun 66,3%. Tapi dalam kondisi yang demikian, justru rumah tangga petani mengalami peningkatan dari 26 ke 28.000.000 rumah tangga petani dalam 10 tahun terakhir ini. Di sisi lain, di setiap sub sektor terus mengalami penurunan.

Kesimpulan. Impor pangan yang semakin tinggi telah menyebabkan ketergantungan Indonesia terhadap komoditas pertanian pangan impor semakin tahun semakin meningkat. Ketergantungan tersebut menyebabkan Indonesia semakin rentan terhadap gejolak harga pangan dunia, sehingga bila terjadi krisis pangan, dampaknya dengan segera dirasakan oleh Indonesia.

Ketiga. Impor pangan juga menyebabkan petani berbagai komoditas pangan utama tidak lagi mampu bersaing dengan produk impor yang menyebabkan mereka beralih ke komoditas lain atau meninggalkan dunia pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Hasil akhir dari kesemuanya adalah penurunan kesejahteraan petani yang tergambar dari meningkatnya jumlah rumah tangga petani berlahan sempit, penurunan jumlah petani yang menguasai lahan yang luas, dan penurunan jumlah rumah tangga petani untuk semua sub sektor pertanian dalam 10 tahun terakhir.

Catatan. Seluruh data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari BPS dan Pusdatin Kementerian Pertanian berbagai tahun.

Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu Hakim MK Yang Terhormat. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA SUHARTOYO [13:24]

Walaikumsalam.

Dari Pemohon 203, ada pertanyaan untuk Ahli?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [13:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, pertama, menurut Ahli, apakah kedaulatan pangan itu dapat ... pangan dapat dicapai melalui impor pangan? Itu yang pertama, ya.

Yang kedua, kemudi ... yang kedua, berdasarkan data Ahli tadi bahwa biaya produksi kedelai lokal mencapai Rp10.000,00 sampai Rp13.000,00, sementara impor yang CIF hanya Rp6.900,00 per kilo. Bagaimana Saudara Ahli melihat kegagalan negara dalam menetapkan instrumen harga atau tarif yang seharusnya melindungi hak petani untuk mendapatkan perlindungan hidup yang layak?

Yang kedua, yang soal kerentanan. Anda menyatakan bahwa tadi yang di terakhir ... poin terakhir. Bahwa ketergantungan impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga dunia. Dalam perspektif konstitusi mengenai soal kemakmuran rakyat, apakah kebijakan yang membiarkan negara dalam posisi rentan terhadap krisis pangan global ini

dapat dianggap sebagai pengabaian kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa?

Gitu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA SUHARTOYO [14:51]

Dari DPR, ada pertanyaan untuk Ahli untuk Permohonan 203, ya?

24. DPR: ANNISHA ANDINI [14:56]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA SUHARTOYO [14:57]

Cukup. Dari Pemerintah? Cukup? Silakan.

26. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [15:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA SUHARTOYO [15:09]

Walaikumsalam.

28. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [15:10]

Mohon perkenan ... maaf terlambat, Yang Mulia, tadi. Begitu juga Bapak, Ibu lainnya.

Izin, Prof. Ahli. Prof mempunyai latar belakang di bioteknologi yang ... yang kami cermati sangat mumpuni. Kami mohon perkenan Prof untuk memberikan pencerahan bagi kami. Tanaman ataupun jenis pangan apa yang ... yang memang secara alami itu kurang cocok di Indonesia? Jadi, ini karena sesuai dengan kepakaran Prof, karena kita ... kami mohon perkenan dari Pemerintah, ingin mengidentifikasi kalau memang tanaman pangan tersebut dia tidak cocok di Indonesia. Ini kan akhirnya terpaksa Pemerintah akhirnya kan melakukan impor, antara lain, tadi Prof sudah menjelaskan gandum, saya yang awam ini menilai gandum itu kan susah ditanam di Indonesia. Nah, di titik ini, kami juga mohon perkenan kepada Prof adalah ... yang berikutnya adalah ketika kita menolak impor tertentu, ini kan justru tujuan Pemerintah itu mengimpor karena terpaksa dalam rangka agar harga pangan itu stabil, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, Prof.

29. KETUA: SUHARTOYO [17:09]

Langsung pertanyaannya saja, Pak!

30. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [17:09]

Pertanyaannya adalah kalau Pemerintah tidak melakukan impor, apakah ini tidak berisiko kepada harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah?

Yang kedua, kami mohon perkenan Prof. Pengalaman Prof yang mumpuni di berbagai negara, ada berbagai negara maju yang juga terpaksa melakukan impor pangan. Nah, kira-kira dari kajian Prof, negara tersebut melakukan impor pangan negara maju, Prof, mohon perkenan, itu dasar pertimbangannya apa, Prof?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih banyak.

31. KETUA: SUHARTOYO [18:00]

Dari Majelis Hakim? Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia!

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:06]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Prof, ini menyapaannya ini Prof. Dwi atau Prof. Andreas atau Prof. Santosa?

33. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025: DWI ANDREAS SANTOSA [18:19]

Terserah saja, Pak Guntur.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:21]

Gitu ya? Oke, baik. Jadi, di depannya saja, ya. Jadi, Prof. Dwi, tapi sepertinya Prof. Andreas, ya, lebih lazim mungkin.

35. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025: DWI ANDREAS SANTOSA [18:31]

Silakan!

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:33]

Ya dan Prof. Andreas memang Ahli dan alumni dari Braunschweig Germany TU nya S3 nya dan predikat Magna Cum Laude, selamat, ya, guten tag.

Prof. Andreas, jadi saya tertarik pertama, data yang Prof. Andreas sampaikan bahwa ternyata klaim Pemerintah bahwa di swasembada ... apa ... swasembada beras tanpa ada impor itu sudah sebetulnya terbantahkan dengan ... apa ... data yang Saudara sampaikan bahwa ternyata untuk tahun 2025 itu, ada impor sebanyak 454.000 ton, gitu ya, dan apakah itu bisa dikategorikan bahwa ini memang kita sudah swasembada dengan adanya impor beras seperti itu? Itu pertanyaan pertama yang sebagai Ahli di bidang dari Institut Pertanian Bogor, ya.

Jadi, perlu kita ada pencerahan dan perspektif bahwa apakah itu bisa kita katakan bahwa kita ini sudah ... apa namanya ... swasembada beras? Karena memang di publik ini kan kadang ... apa ... ya, sulit memahami ... ini bahasa swasembada ini sangat ini karena swasembada ternyata itu banyak ... apa ... jenisnya, ya, komoditas pangan itu kan, komoditas pertanian itu, yang mana nih yang swasembada? Swasembada beras, apakah memang 100% swasembada beras? Ternyata ini ada impor beras di tahun 2025 itu yang dikatakan swasembada itu ada 454 ton. Nah, ini menurut sudut pandang Prof, ini apakah kalau masih ada impor itu, apakah itu bisa masih tetap dikatakan sebagai swasembada atau bagaimana dari perspektif keilmuan dari Prof. Andreas? Itu satu sebagai anu dulu, pembuka, artinya.

Kemudian yang kedua, Prof. Andreas, ya, ini kan seperti yang saya katakan tadi, banyak variasi komoditas pertanian ini, pangan, mulai dari jagung, kedelai, dan macam-macam. Nah, sementara kita di satu sisi juga, kita mengenal bahwa negeri kita ini adalah zamrud khatulistiwa. Apa artinya? Apakah memang ada komoditas yang tidak bisa, ya, hidup atau bisa diproduksi di bumi pertiwi kita ini, sehingga harus itu dilakukan dengan cara impor? Gitu. Menurut keahlian Prof. Andreas, apakah memang ada komoditas yang tidak bisa hidup di tanah air kita ini atau tidak bisa diproduksi, sehingga memang solusinya adalah dengan cara impor? Atau tidak ada, semua itu bisa dilakukan kalau ... ya, semuanya mau, gitu kan, semua pihak mau melakukan itu? Nah, itulah yang kita sebut dengan kemandirian ... apa namanya ... pangan, pertanian, kan begitu. Kalau sudah mandiri, berarti tidak ada yang tidak bisa ditanam di bumi pertiwi kita. Sehingga kita memang ... apa yang Pak Andreas katakan di kesimpulan bahwa implikasinya kepada petani, itu justru, ya, sejauh ini malah melebar, gitu kan, malah menjauh ya dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Kan begitu ya kesimpulan itu.

Nah, itu kan berarti apa? Kemungkinan ada banyak, ya ... apa namanya ... komoditas yang tidak bisa diproduksi dalam negeri kita, kecuali kita harus impor, gitu. Nah, itu.

Jadi oleh karena itu sebagai Ahli, nah saya ini minta pandangan perspektif dari Prof. Andreas, apakah memang seperti itu kita punya negeri kita ini, harus dilakukan dengan substitusi impor itu? Nah, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, ini Prof Andreas. Nah, ini gini. Memang di sini ada sudut pandang lagi nih, minta perspektifnya Prof Andreas nih. Kalau kita gunakan import, memang itu juga membantu masyarakat, utamanya untuk jangka pendek. Karena apa? Tanpa import, maka tentu, ya, harga akan naik, kan begitu. Maka cara untuk mengatasi harga naik, supaya masyarakat tidak teriak terhadap bahan-bahan komoditas, utamanya komoditas pokok, sembako, itu pasti akan tinggi. Maka caranya adalah dengan cara impor untuk supaya bisa harga di tingkat petani itu bisa menjadi turun. Tetapi itu jangka pendek. Nah, jangka panjangnya seperti yang Prof Andreas sampaikan, ini akan menimbulkan ketergantungan terkait dengan produk-produk atau komoditas impor tadi. Kalau Indonesia kita sudah tergantung, maka for the long time, dia akan naik kembali, merangkak naik kembali harga tersebut.

Di sisi lain, kita pengin juga supaya ketahanan petani kita juga betul-betul semakin berdaya seperti di negara-negara Eropa yang kita kenal, para petani-petani justru adalah lebih banyak orang-orang yang kaya di sana petani-petaninya. Nah bagaimana kita bisa mencapai taraf petani yang kita sebut sebagai orang-orang kaya seperti itu kalau ya impor terus mengisi komoditas, ya mengisi semua bahan-bahan pangan di dalam negeri kita.

Sehingga benar kata Prof. Andreas, akhirnya petani ya ketimbang harganya itu jatuh, dia pindah ke profesi lain, jadi buruh kasar lah, jadi apalah. Akhirnya ya kita akan terjebak terus dalam sistem ketergantungan. Nah menurut Prof. Andreas, apakah bisa kita katakan kepada publik/masyarakat untuk jangka pendek bersabar. Bisa kemungkinan harga naik, tapi kalau itu harga di tingkat harga petani kita misalnya yang diproduksi oleh petani harganya tinggi, ya enggak perlu pake impor, biarkan saja tinggi. Supaya apa? Petani kita menikmati keuntungan dari tingginya produk pertanian itu, tapi masyarakat memang akan ribut, gitu kan, karena tinggi. Tapi ini untuk kepentingan supaya petani bisa dia sustain, bisa dia tough di profesinya selaku petani tadi itu. Sehingga kalau dia ... apa namanya ... tetap di situ dan ditambah dengan seperti kepakaran dari Prof. Andreas dan teman-teman dari ahli pertanian, sehingga dia punya produktivitasnya, berapa kali panen dalam setahun, itu akan meningkat terus, akhirnya untuk jangka panjang harga akan menjadi stabil kembali, tetapi kesejahteraan itu bisa dirasakan atau bisa dinikmati oleh para petani. Jadi pilihannya di situ.

Nah menurut Prof. Andreas, masuk mazhab yang mana nih, ya? Apakah memang ingin supaya petani ini biarkan saja dia harganya tinggi, tapi dinikmati oleh para petani, ketimbang kalau tinggi kemudian masuk lagi impor untuk supaya masyarakat tidak teriak terkait dengan harga-harga barang yang tinggi itu?

Nah, di sini saya kira yang tentu Prof. Andreas yang punya ... apa namanya ... kewibawaan untuk menyampaikan hal-hal seperti ini karena Prof. Andreas memang di bidang ini. Kalau saya ini hanya sekadar ... apa namanya ... ya paham-paham sedikitlah menyangkut bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk bisa berpihak kepada petani, supaya petani ini yang menjadi notabene ya ... apa namanya ... profesi yang terbesar di tanah air kita.

Mungkin itu yang ingin saya tahu perspektif dari Prof. Andreas. Saya kira itu, Yang Mulia, kami kembalikan ke Pak Ketua, terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [27:02]

Baik. Prof. Enny, silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:05]

Baik, terima kasih, Ahli Prof. Dwi. Prof. Dwi, ada beberapa hal yang saya mohon nanti bisa diberikan tambahan, bahkan bisa tertulis Prof. Dwi ya.

Pertama begini, tadi mendengarkan apa yang disampaikan Prof. Dwi, saya ingin tahu sebetulnya kondisi-kondisi apa sih sebetulnya yang mempengaruhi Indonesia pada saat dikatakan pernah atau dapat berswasembada ... berswasembada pada waktu itu? Itu saya ingin tahu gambarannya seperti apa? Itu walaupun masa lalu sebenarnya Prof. Dwi ya itu, kondisinya jauh sekali ternyata sebelum tahun 80-an itu, ya.

Kemudian, saya baca beberapa tulisan bahwa kalau saat ini tampaknya itu sulit sekali untuk melakukan swasembada, bahkan Presiden Jokowi pun mengatakan sangat sulit RI untuk dapat mewujudkan swasembada seperti itu. Itu salah satunya adalah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu soal iklim, ada perubahan iklim, kemudian alih fungsi lahan, ya.

Nah, persoalannya adalah di dalil Para Pemohon ini, ini kan kaitanya dengan Pasal 19, itu kan dilarang untuk dilakukan alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budi daya pertanian, seperti itu, kecuali ini dapat dilakukan itu ketika ada kepentingan umum atau Proyek Strategis Nasional.

Nah, ini persoalannya adalah ketika akan dilakukan alih fungsi lahan, sementara kondisi faktualnya kita susah kemudian untuk bisa berswasembada, apakah kemudian ketentuan yang mengatur syaratnya untuk bisa dilakukan alih fungsi tadi dengan karena ada Proyek Strategis

Nasional yang ditentukan di sini, sudah mencukupi belum berdasarkan pengetahuannya Ahli ini. Sudah mencukupi belum Prof, soal ... apa namanya ... syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (4) itu? Jadi, syaratnya seperti apa sih sebetulnya yang kemudian kita ... paling tidak bisa mengurangilah, ya, derajat dari impor itu, walaupun belum bisa sampai berswasembada.

Itu mohon dapat dijelaskan konkretnya Pasal 19 itu seperti apa persoalannya itu, Prof. Dwi ya. Terima kasih, Prof.

39. KETUA: SUHARTOYO [29:28]

Yang Mulia Pak Pak Adies dulu, ke Panel.

40. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [29:32]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Prof. Dwi, saya mohon penjelasan tambahan saja, ini kan datanya lengkap, Prof. Dwi sudah kasih. Tolong dijelaskan, kenapa negara kita sampai sekarang masih impor terus itu pangan dan lain-lain, kira-kira penyebabnya apa itu, Prof?

Nah, kemudian tadi disampaikan juga oleh Prof. Guntur, dalam waktu jangka pendek itu harus seperti apa? Nah, apabila ini tidak impor, jadi mampu tidak dalam waktu dekat, negara kita ini memenuhi kebutuhan masyarakat apabila ini tidak impor. Nah, kemudian kalau masih harus impor, apakah ada solusi lain selain itu untuk memenuhi kebutuhan ini, ya. Mampu tidak kita kalau tidak impor, dikaitkan dengan kondisi negara kita, tadi sudah dijelaskan negara subur, negara di khatulistiwa, dan lain-lain, tetapi impornya saya lihat ini dari data, bawang putih 100%, gandum 100%, rata-rata ... kedelai hampir 100%, 97% susu, gula rata-rata di atas 70%. Kenapa bisa seperti itu dan bagaimana solusinya?

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [31:17]

Baik. Silakan, Yang Mulia Arsul.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Prof. Dwi Andreas Santosa. Saya sedikit saja, saya mencermati data-data statistik kuantitatif yang Prof sampaikan dalam Keterangan Ahli ini, salah satunya terkait dengan penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian.

Nah, apa ... ini ada dua hal di sini yang kemudian saya kira paling tidak menjadi concern saya, ya. Di satu sisi, ya, jumlah rumah tangga usaha pertanian ini ... apa ... makin mengecil, menurun. Tapi ... dan ini sebetulnya in line dengan ... apa ... menurunnya juga, mestinya, ya, dengan produksi pertanian kita, termasuk pangan. Tapi di sisi lain, kan Pemerintah ini dalam kebijakannya, logikanya kalau secara ... bagi saya yang pendek pengetahuan yang terkait dengan isu ini, adalah reforma agraria kan harusnya yang utama adalah membagikan, yaitu tadi tanah-tanah yang tadinya katakanlah bukan milik petani dikuasai negara kepada para petani, biar petaninya lah rumah tangga usaha pertanian itu kembali meningkat. Tapi di sini kan, ada ... apa ... persoalan juga, orang yang mau jadi petani juga makin menurun, gitu. Nah, bagaimana Prof melihat itu?

Yang kedua, kemudian ada juga kebijakan pembangunan yang diterapkan, saya tidak tahu persis apakah ini dalam rangka merespons menurunnya rumah tangga usaha pertanian, tapi kebijakan pertanian yang diselenggarakan oleh negara lah. Saya sebut saja begitu, bukan oleh para petani. Makanya polisi sekarang juga bertambah tupoksinya, gitu kan, dengan bertani jagung juga.

Nah ... apa ... bagaimana Prof melihat soal ini? Artinya, ini kan di satu sisi ada concern dalam Permohonan ini, dimana begitu banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian, tapi di sisi lain juga, sekali lagi saya sebut, negara juga membuka lahan-lahan pertanian baru lah, meskipun itu di pulau lain, tidak di pulau Jawa.

Nah, bagaimana Prof melihat ini sebagai imbangannya? Itu, ya. Karena ... apa ... di satu sisi, sekali lagi, banyak alih fungsi lahan pertanian, apalagi di pulau Jawa ini, tapi di sisi lain juga ada pembukaan-pembukaan juga lahan pertanian yang cukup masif yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh negara. Saya mohon pencerahan dari Prof ini, karena ini terkait juga nantinya dengan apa yang diminta oleh Para Pemohon dalam Petitum Permohonannya.

Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [35:08]

Baik. Prof. Saldi, terakhir, silakan.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:14]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ahli, sebagian yang rencana saya tanya sudah disinggung. Saya punya satu poin yang tertinggal, Prof. Tadi kan penjelasan Prof, soal impor dengan kondisi pertanian dalam negeri, itu kalau impor itu kecenderungannya pada beberapa ... apa ... sektor, itu lebih murah biayanya ketimbang yang dihasilkan petani dalam negeri. Jadi, kayak

kedelai tadi, itu kalau dihitung ada kan 4 atau 5 kali lipatunya, ya, antara kita produksi sendiri, yang didatangkan dari luar negeri.

Nah, ini dalam konsep kedaulatan pangan, kira-kira bagaimana mempertemukan dua titik yang dalam batas tertentu bisa dianggap kayak ekstrem begini? Jadi, kita bisa membatasi impor, tapi kemudian harga petani juga tidak memberatkan kepada ... apa namanya ... konsumen yang membutuhkan produk pertanian itu. Bagaimana mempertemukan dua titik yang seperti ini? Sebab kalau hitungan-hitungan ekonomi kalau kita memproduksi lebih mahal, ya, kita datangkan dari luar dengan cara impor, itu kan akan jauh lebih menguntungkan secara ekonomi. Tapi, kan itu belum tentu dalam konsep kedaulatan pangan. Tolong diberi penjelasan soal-soal yang begini, Ahli.

Terima kasih, Pak Ketua.

45. KETUA: SUHARTOYO [36:47]

Baik. Silakan, Prof, dijawab. Bisa simultan jika ada keterkaitan satu dengan yang lain pertanyaannya.

46. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025: DWI ANDREAS SANTOSA [36:57]

Ya, terima kasih.

Yang pertama dari Pemohon dari ... yang terkait dengan kedaulatan pangan, apakah dengan cara impor, maka kedaulatan pangan kita bisa tercapai atau tidak? Kalau seperti itu, sebenarnya jawabannya sudah jelas, tidak mungkin tercapai ketika ... karena apa? Kedaulatan ini lebih tinggi lagi dalam sisi makna, kalau makna akademisnya dibanding dengan swasembada. Jadi, itu jadi tidak bisa tercapai.

Lalu, kemudian ketergantungan impor. Apakah kedelai misalnya, ini merupakan kegagalan negara terkait dengan kedelai? Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, sebenarnya kita pernah swasembada kedelai di tahun 80-an kita pernah swasembada kedelai. Lalu, kemudian pemerintah membuka pintu setelah kita menandatangani letter of intent dengan IMF, membuka pintu impor kedelai. Sehingga kedelai dari luar, terutama pada saat itu dari Amerika Serikat dengan segera masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, jadi ini sudah barang tentu kalau kita lihat secara seperti itu, ini amat sangat penting kebijakan pemerintah terkait dengan itu. Selama kebijakan pemerintah tidak memihak petani kita, maka hasilnya sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam makalah.

Lalu kemudian, apakah ketergantungan impor menyebabkan kita rentan terhadap krisis pangan? Jawabannya pasti. Karena apa? Produk

yang kita impor, itu sebenarnya kalau dalam kriteria akademis, disebut sebagai low artificial price. Dia harganya rendah, tapi tidak mencerminkan biaya produksi di negara yang bersangkutan. Jadi, ini yang amat sangat penting. Kenapa sebuah negara itu mengekspor? karena terjadi Surplus. Tidak akan mungkin sebuah negara mengekspor produk pertaniannya kalau tidak terjadi surplus. Nah, ketika terjadi surplus, ya, otomatis akan diekspor ke negara lain, at all cost.

Sehingga untuk itu, ketika kita bicara mengenai WTO bahwa negara-negara maju, eksportir pangan dunia harus menurunkan subsidi ekspor. Itu sebagai salah satu contoh. Lalu kemudian menurunkan support bagi petani mereka. Nah, sehingga di situ kemudian produk pertanian di negara yang bersangkutan meningkat dan pemerintah mendorong untuk mengekspor yang sebagian didanai oleh negara. Jadi, untuk itu di dalam kaca mata akademis, harga impor yang ada di dunia internasional karakternya low artificial price. Jadi, harga rendah, tapi sesungguhnya harga tersebut artificial.

Dan ini amat sangat penting kalau terjadi krisis pangan. Dan ini sudah beberapa kali terjadi krisis pangan dunia, tahun 1972 sampai tahun 1975 itu krisis pangan dunia yang pertama kali, diawali dari turunnya produksi. Lalu tahun 1973 kita tahu terjadi Arab ... apa ... embargo minyak oleh negara-negara Arab, yang menyebabkan harga pangan dunia pada saat itu melonjak sangat tinggi, dan itu sudah barang tentu yang paling sengsara adalah negara-negara importir.

Dan hal yang sama terjadi lagi di krisis pangan dunia kedua tahun 2007-2008. Dimana harga pangan dunia melonjak hampir dua kali lipat. Dan yang paling parah, terjadi krisis pangan ketiga tahun 2010-2011. Karena apa? Terjadi penurunan produksi dunia di tahun 2010, tahun 2011 harga pangan dunia melonjak hampir satu kali ... hampir dua kali lipat. Dan itu menyebabkan kerusuhan sosial yang sangat besar di banyak negara, terutama negara-negara yang ketergantungan impornya tinggi. Di mana negara tersebut? Di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah. Untuk itu kemudian terjadi bencana yang kita sebut sebagai Arab Spring. Kejatuhan berbagai rezim di Timur Tengah dan Afrika Utara akibat krisis pangan. Puluhan ribu orang meninggal akibat krisis pangan, riot, food riot, dan lain sebagainya, dan akhirnya rezim berganti.

Jadi pangan ini menduduki porsi yang teramat penting. Ketika kita menggantungkan pangan kita dari impor, maka bencana nanti ke depan bisa terjadi. Jadi itu terkait dengan itu.

Lalu dari Pemerintah, tadi terkait dengan bioteknologi. Memang ... saya memang background S3 saya di ... agak very hard science. Hanya kebetulan terakhir-terakhir ini kemudian karena bergaul dengan petani, lalu apa ... harus menulis di berbagai media dan lain sebagainya, sehingga sekarang ini spesialis saya spesialis umum, Mas.

Oke terkait dengan bioteknologi, memang betul tidak semua jenis pangan bisa kita tanam di Indonesia, pasti. Sebagai salah satu contoh adalah gandum.

Gandum kita paksakan tanam di Indonesia hasilnya pasti ... pasti gagal. Gitu saja, hasilnya pasti, pasti gagal. Kenapa ... tapi problem besarnya kenapa kok kita tiba-tiba beralih ke gandum? Jadi tahun ... di akhir tahun 60-an, pemerintah Amerika Serikat memberikan sumbangan pangan, karena akhir tahun 60-an kita mengalami krisis pangan. Karena Amerika punya gandum, yang disumbang ke Indonesia adalah gandum. Lalu kemudian mulai tahun 70-an kita perlahan-lahan impor gandum. Pada saat itu di tahun 70-an proporsi gandum sebagai pangan pokok kita itu baru 4,7%. Lalu kemudian perlahan-lahan meningkat dan sebagaimana saya sebutkan di makalah, saat ini ketergantungan pangan pokok ... bisa dibayangkan pangan pokok, ya, dari impor itu sudah 28%. Bisa dibayangkan ini dari gandum, padahal gandum 100% kita impor.

Nah, tadi juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang lain. Lalu mengapa demikian? Yang pertama, sudah barang tentu berubahnya pola konsumsi masyarakat kita, berubah. Kalau anak-anak kita kalau masa kami dulu karena saya generasi baby boomer gitu kan, ya, kalau enggak makan pecel, ya, enggak enak gitu kan, ya. Tapi sekarang kalau anak-anak kita sudah beralih ke makanan berbasis gandum.

Jadi sebagaimana kita ketahui, katanya lidah tidak bertulang, sehingga lidah pun berubah. Dan ini, sekali lagi dipicu oleh kebijakan Pemerintah. Kita ingat pada tahun 1970-1980, Pemerintah melakukan apa yang disebut sebagai Swasembada Beras (SSB). Programnya Orde Baru kan, SSB. Dan apa di dalam SSB tersebut? Komponennya apa? Komponennya hanya beras. Beras disebar di seluruh wilayah Indonesia, tidak peduli masyarakat di wilayah tersebut makannya apa. Sehingga, mulailah pelan-pelan perubahan konsumsi di hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dari makanan lokal, kalau kita lihat misalnya di wilayah Indonesia bagian timur sudah barang tentu sago menduduki proporsi utama. Lalu kemudian, kalau di Jawa sih istilahnya polo kependem, ya, yang umbi-umbian juga menjadi proporsi utama. Tapi saat ini sudah berubah, coba kita datang ke Papua dan ke manapun, sudah berganti dengan beras. Jadi, amat sangat terkait dengan perubahan konsumsi tersebut, yang pertama. Sehingga, masyarakat berubah dari konsumsi pangan lokal perlahan-lahan berubah ke beras. Dan beras pun perlahan-lahan saat ini celaknya, perlahan-lahan tergantikan oleh gandum. Ini masalah besar lagi, kan. Kenapa tergantikan oleh gandum? Balik lagi terkait dengan harga. Sebagaimana tadi saya sampaikan, harga internasional karakternya low artificial price. Lebih baik kita mengimpor gandum yang harganya jauh lebih murah. Harga gandum sebelum sekarang ini naik, itu hanya gandum sudah dalam bentuk tepung kualitas tinggi, tepung kualitas tinggi harganya

sebelumnya hanya Rp9.800,00. Saat ini mungkin di retail sekitar Rp11.000,00 sampai Rp13.000,00. Harga beras berapa? Silakan kita lihat katakanlah dari Bank Indonesia yang memotret harga beras di pasar. Saat ini sudah Rp15.800,00 harga beras, bahkan mendekati Rp16.000,00 di retail, di tingkat konsumen. Harga gandum paling mahal Rp13.000,00, se ... dengan kualitas yang begitu tinggi. Harga beras itu di situ rata-rata beras medium ... beras rendah sampai kualitas tinggi, harganya rata-rata hampir Rp16.000,00 saat ini. Jadi, itu. Sehingga, perlahan-lahan masyarakat berpindah juga. Dan juga ... kita lihat juga perubahan pola terkait dengan itu. Kenapa masyarakat di Indonesia bagian timur beralih ke beras? Karena mereka hanya perlu waktu 30 menit untuk masak, sudah bisa dikonsumsi. Bisa dibayangkan kalau itu memasak katakanlah sagu atau pangan pokok yang lainnya, berapa lama waktu diperlukan? Dan celaknya, ketika kita memasak pangan berbasis gandum, berapa waktu yang diperlukan? Bapak, Ibu tahu semua, 3 menit. Sehingga kalau kita datang ke Papua, apa yang dimohonkan masyarakat di sana? Karung mie instan, satu kardus mie instan, bukan lagi beras. Jadi, ini perubahan yang amat sangat signifikan dan sudah barang tentu peran Pemerintah amat sangat penting di sana.

Jadi, betul tadi, Pak, bahwa ada beberapa tanaman yang tidak cocok ditanam di Indonesia. Kita paksakan karena saya dengar program Pemerintah katanya mau tanam gandum. Saya jawab, "Ya, pastilah, pasti gagal," gitu. Karena gandum hanya bisa ditanam di dataran tinggi, di atas 1.000. Padahal di dataran tinggi, di atas 1.000 tersebut, kita rebutan dengan pangan-pangan hortikultura yang harganya sangat tinggi. Jadi, itu. Ini masalahnya. Jadi, betul, terkait dengan pernyataan tadi.

Nah, lalu kemudian ketika kita menolak impor tertentu karena harga ... nah, tadi, maka harga, apakah harga itu mungkin terjangkau atau tidak? Memang betul, itu jadu ... itu juga masalah problem yang perlu kita hadapi bersama. Dalam arti, sebagaimana tadi saya sampaikan, harga pangan impor lebih murah. Beberapa bahkan jauh lebih murah dibanding yang kita tanam di Indonesia. Tetapi, apakah kita terus-terusan seperti itu? Nah, ini pertanyaan besar. Ketika kita kemudian terus-terusan melakukan impor, ketergantungan terkait dengan impor semakin lama semakin besar, maka kita memasuki ambang bahaya. Dan tadi sudah saya sampaikan, gandum saja sudah 28%. Kalau terjadi guncangan krisis pangan dunia lagi, harga gandum melonjak tinggi, ya, sudah. Ketika terjadi guncangan lagi, harga kedelai melonjak tinggi, yang pernah terjadi juga. Lalu akhirnya terjadi demo pengusaha-pengusaha kedelai dan tempe kan? Sehingga kedelai ukurannya diperkecil atau harganya naik. Jadi, itu pasti akan menimbulkan risiko teramat besar bagi kita. Dan apa, ya, istilahnya, ya, pemerintah tetap jalan terus. Sebagaimana tadi 10 tahun terakhir saja ya saya tunjukkan. Jadi, perkembangan impor komodi ... 12 komoditas saja

dari 21,1 juta ton, melonjak ke 34,4 juta ton. Hanya dalam tempo 10 tahun, bisa dibayangkan.

Dan sudah barang tentu terkait impor, mohon maaf, ini terlalu besar keuntungan yang diperoleh para importir. Amat sangat besar. Sebagai contoh saja, bawang putih masuk ke pelabuhan di Indonesia, ya, tergantung fluktuasi harganya. Pernah harga bawang putih hanya sekitar Rp9.000,00, sampai saat ini mungkin sampai sekitar Rp13.000,00. Berapa bawang putih di level konsumen? Di atas Rp40.000,00, Rp43.000,00 sampai Rp45.000,00. Sehingga keuntungan yang diperoleh bagi importir, amat sangat besar. Nah, sudah barang tentu kita tahu bersamalah, apalagi Bapak, Ibu Hakim Yang Mulia terkait dengan hal ini, permainannya seperti apa? Bagaimana fee harus disetor? Disetornya ke mana? Itu banyak permainan seperti itu. Jadi, impor ini menguntungkan banyak orang. Sehingga untuk itu kenapa ketergantungan kita terhadap impor semakin lama semakin besar.

Lalu, kepada Yang Mulia Prof. Guntur, terkait dengan swasembada beras. Jadi, pada saat pemerintah menyampaikan swasembada pangan, di bulan Januari yang lalu, saya diwawancarai salah satu media, TV, lalu hanya dalam selang seminggu, wawancara tersebut di-takedown. Saya tanya ini dimarahin siapa ini? Padahal apa yang saya kemukakan 100% berbasis data. Sebagaimana yang saya sampaikan saat ini, bahwa swasembada pangan, itu istilah yang tidak tepat. Karena apa? Bagaimana kita bisa menyatakan swasembada pangan, kalau saat ini 28% konsumsi pangan pokok kita adalah gandum yang 100% kita impor. Karena pangan itu definisi pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan, itu semua hal yang kemudian masuk ke mulut kita, yang kita konsumsi. Untuk kebutuhan energi maupun pertumbuhan, itu seluruhnya itu adalah pangan. Lalu, impor pangan dalam 10 tahun terakhir melonjak 12.000.000 ton, bagaimana bisa? Itu disebutkan sebagai swasembada pangan. Itu yang kami ulas pada saat itu.

Lalu kemudian, kami usulkan sebenarnya, oke, kita memang betul tahun 2025 mencapai swasembada beras. Tapi hal yang disampaikan seolah-olah kita baru swasembada beras lagi setelah tahun 1984. Ini masalah lagi. Pada saat itu juga yang mewawancarainya juga heran, "Lho, oh Pak Andres, berarti kita itu sudah swasembada beras berkali-kali?"

"Ya". Karena bayangan kami itu swasembada beras itu tahun 1984, lalu kita swasembada lagi di tahun 2025.

Saya sampaikan, 10 tahun terakhir ini saja, kita mencapai swasembada beras. Kapan? 2017, 2019, 2020, 2021, 2022. Tahun 2023 kita mengimpor beras cukup besar sekitar 3,06 juta ton, tahun 2024 kita mengimpor beras 4,15 juta ton. Lalu tahun 2025, tadi yang disampaikan Prof. Guntur, kita mengimpor 454.000 ton. Lalu kalau demikian, apakah dengan impor yang hampir setengah juta ton tersebut, kita bisa menyatakan diri swasembada beras? Ya, memang kalau jawaban saya,

sudah barang tentu enggak bisa. Karena apa? Kalau kita bicara swasembada, kita balik lagi ke definisi akademis, itu ada yang disebut sebagai self-sufficiency ratio. Kalau kita bicara swasembada pangan, berarti food self-sufficiency ratio. Apa makna self-sufficiency ratio? Kita mencapai swasembada bila self-sufficiency ratio sama atau lebih besar satu? Apa makna sama atau lebih besar satu, bila produksi kita sama atau melebihi yang kita konsumsi, ini. Untuk itu, swasembada pangan, ya sudahlah, enggak amat sangat sulit kita mencapai swasembada pangan. Swasembada beras pun kita pertanyakan karena masih ada impor beras, walaupun itu adalah beras khusus, beras khusus itu maknanya beras yang tidak bisa kita produksi walaupun bisa juga. Jaringan tani kami katakanlah beras khusus itu japonica. Jaringan tani kami di AB2TI ada yang tanam japonica. Katakanlah beras khusus adalah basmati, jaringan tani kami bisa tanam basmati di Indonesia, tidak ada masalah kalau tanam padi.

Lalu yang proporsinya terlihat cukup besar adalah menir yang kita impor sebagai komponen quote unquote beras khusus tersebut. Menir, ya pastilah. Setiap penggilingan padi kita pasti memproduksi menir. Jadi, sesungguhnya juga kalau kita boleh berterus terang, kita juga tidak mencapai swasembada beras. Karena swasembada beras yang dipahami oleh pemerintah ketika Indonesia tidak mengimpor beras umum, yes, kita memang tidak mengimpor beras umum. Beras umum dilakukan oleh siapa? Hanya satu lembaga yang boleh mengimpor beras umum, yaitu Bulog, jadi memang Bulog tidak mengimpor beras umum tahun 2025 ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, tadi saya sebutkan ada lima kali kita tidak mengimpor beras umum.

Jadi itu, Prof. Guntur terkait dengan swasembada beras tadi.

Lalu kemudian, memang betul kita disebut sebagai ... kalau di kalangan kami, gemah ripah loh jinawi, apalagi kalau Koes Plus lempar tongkat jadi tanaman. Jadi, memang betul. Kalau kita lihat Indonesia dengan keragaman yang begitu besar, sebenarnya kita tidak perlu kekurangan pangan. Sangat betul kalau kita kembali ke budaya lokal masing-masing. Tetapi ketika budaya pangan juga diseragamkan, di situ masalahnya. Karena untuk beras saja, katakanlah untuk padi, wilayah mana yang paling cocok untuk budi daya padi? Ya, Jawa. Pulau Jawa. Untuk itu Dewi Sri lahirnya di Jawa, untuk itu ada Jawa Dwipa. Jawa menjadi pusat pertumbuhan pangan yang penting. Kalau Jawa, pernah ada wacana pada saat itu di pemerintah-pemerintah sebelumnya bahwa Jawa akan dipusatkan sebagai pusat industri dan jasa dan pertanian digeser ke luar Jawa. Pada saat itu saya jawab, kalau ini dilakukan betul, terjadi bencana besar di Indonesia. Karena lahan-lahan kelas satu untuk pangan, itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, tapi pangan ini kan berbagai macam, tidak hanya padi. Tapi ketika kita kemudian program kita menyeragamkan yang seperti itu yang terjadi.

Nah, lalu kemudian, jadi komoditas sudah barang tentu tergantung komoditas yang ada di Indonesia. Masih sangat banyak komoditas-komoditas pangan di Indonesia. Di Pulau Jawa saja waktu kami kecil, Jawa itu ada istilahnya polo kependem. Jadi masyarakat Jawa itu sangat-sangat ... apa ... erat dengan yang disebut sebagai polo kependem. Kenapa masyarakat Jawa menanam polo kependem, umbi-umbian maksudnya, berbagai umbi-umbian, itu untuk menghadapi musim kemarau. Kalau terjadi musim kemarau, maka masih ada makanan di dalam tanah. Tapi sudah barang tentu budaya tersebut sekarang ini sudah tergantikan oleh beras dan celakanya beras perlahan-lahan tergantikan oleh gandum. Jadi itu.

Lalu kalau digunakan impor, memang betul, kita mendapatkan harga pangan yang lebih murah dan beberapa hal justru jauh lebih murah daripada biaya produksi yang ada di Indonesia, sebagaimana tadi yang saya berikan contohnya adalah kedelai. Kedelai kalau data yang tadi saya sampaikan, itu harga masuk ke Indonesia mungkin saat ini sekitar Rp9.000,00-an, lalu kemudian biaya produksi Rp13.000,00 sampai Rp15.000,00. Lalu bagaimana kemudian petani kemudian akhirnya menanam kedelai? Ya sudah barang tentu ini menjadi masalah besar karena dia harus bersaing dengan kedelai impor yang harganya jauh lebih murah. Ini masalah besarnya.

Nah, lalu apakah kemudian kita, ya, sudah kalau demikian, ya, sudah, kedelai kita impor saja. Nah dan itu yang kemudian terjadi di Indonesia. Sehingga ... mohon maaf, oh sorry tadi saya salah kutip. Jadi harga kedelai saat ini Rp6.900,00 bisa dibayangkan. Masuk ke Indonesia CIF, CIF itu maksudnya apa? Cost Insurance and Freight. Kedelai sudah masuk ke pelabuhan di Indonesia, bukan FOB. Jadi bisa hanya Rp6.900,00, biaya kedelai di Indonesia Rp10.000,00-Rp13.000,00. Untuk memenuhi kebutuhan kita akan kedelai, ya sudah impor saja. Sehingga ketika beberapa saat lalu, beberapa tahun lalu harga kedelai internasional naik, mendekati biaya produksi di Indonesia, apa yang terjadi? Pemerintah bukannya mensubsidi petani, tapi Pemerintah mensubsidi perajin tahu dan tempe, jadi ini masalahnya. Jadi yang disubsidi adalah justru perajin tahu dan tempe, bukan mensubsidi petani supaya harga kedelai di Indonesia bisa bersaing.

Lalu terkait ini, juga menjawab beberapa hal yang lainnya, terkait dengan masalah impor. Di beberapa negara, saya tahu, tahun lalu berkunjung ke Korea, di Seoul National University, lalu Seoul National University punya perusahaan yang memproduksi susu kedelai. Saya tanya dari mana kedelainya? "Berasal dari petani."

"Berapa Anda membeli kedelai tersebut dari petani?"

"Membeli dari petani di harga Rp75.000,00 kalau saya rupiahkan." Rp75.000,00 harga kedelai dari petani. Tanya-tanya, ngapain enggak impor saja? Impor masuk ke Korea juga hanya Rp7.000,00. Jadi, di sini pembelaan pemerintah itu amat sangat diperlukan.

Nah, pemerintah Korea Selatan misalnya menetapkan harga kedelai di Korea Selatan Rp55.000,00. Itu ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan. Bila harga kedelai di tingkat petani di bawah Rp55.000,00 selisihnya ditanggung oleh pemerintah. Kalau harga kedelai di tingkat petani lebih dari Rp55.000,00 ya sudah, enggak ada masalah. Jadi, itu sudah barang tentu kebijakan itu bisa. Karena apa? Di Indonesia ya, kedelai, tahu, dan tempe ini adalah sebagai lauk, bukan sebagai pangan pokok. Kenapa kok kita tidak mensubsidi petani? Supaya harga kedelai di tingkat petani Rp15.000,00 katakanlah, sehingga petani kemudian bisa beralih tanam lagi, tanam kedelai. Waktu saya kecil di daerah saya Blora, itu pusat kedelai, tapi sekarang kan sudah beralih ke tanaman yang lainnya. Lalu kemudian, kalau petani ditanya kenapa enggak tanam kedelai? Dengan biaya produksi Rp10.000,00-Rp13.000,00 per kilo, lebih baik mereka menanam kacang hijau. Kenapa kacang hijau? Harga kacang hijau Rp18.000,00-Rp20.000,00. Sehingga untuk itu ya, sudahlah, selesai dengan kedelai. Jadi, keberpihakan dari Pemerintah amat sangat diperlukan saya kira terkait dengan ini, Prof. Guntur.

Lalu kemudian, terkait dengan (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [01:01:25]

Agak diringkas jawabnya, Prof.

48. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025: DWI ANDREAS SANTOSA [01:01:25]

Ya, ya, baik. Lalu, jadi ketergantungan impor tadi sudah saya sampaikan untuk Prof. Enny terkait kondisi-kondisi yang mempengaruhi Indonesia pernah swasembada. Sebenarnya sudah barang tentu kembali ke pemerintah, ke peran pemerintah. Bagaimana pemerintah betul-betul mendorong, sehingga swasembada ini bisa tercapai. Bagaimana pemerintah mampu membatasi impor pangan.

Nah, sebenarnya beberapa kali kami usulkan kenapa kok pemerintah tidak membikin tarif saja kan. Misalnya India, berapa tarif impor minyak sawit yang ditetapkan oleh India? 45%. Bisa dibayangkan kenapa India menetapkan tarif 45%, supaya petani bunga matahari India, petani kedelai India yang kemudian dikonversi menjadi minyak, itu tidak mati. Jadi, itu penetapan tarif. Nah, kalau kami diskusi dengan teman-teman di pemerintahan, kalau penetapan tarif, lah kita kan melakukan perjanjian bebas tarif dengan berbagai negara. Ya sudahlah kalau jawabannya seperti itu, ya susah kami. Jadi itu.

Lalu, kemudian terkait dengan ... oh, terkait dengan alih fungsi lahan, mohon maaf, Prof, Enny, terkait dengan alih fungsi lahan memang sebenarnya yang perlu kita pertahankan dengan sangat keras adalah lahan-lahan pertanian di Pulau Jawa. Itu yang perlu kita

pertahankan dengan amat sangat keras. Kenyataan yang ada, lahan pertanian di Pulau Jawa, itu penurunannya yang paling tinggi di Pulau Jawa. Jadi, bagaimana sudah barang tentu ini amat sangat tergantung kebijakan pemerintah, bagaimana pemerintah betul-betul kuat untuk mendorong ke arah sana, perlindungan lahan pertanian, terutama di Jawa.

Lalu, Prof. Adies Kadir terkait dengan negatif ... nah, bagaimana kalau kita tidak impor? Memang betul. Ketika pintu impor kita setop, sudah barang tentu akan terjadi guncangan sejenak, pasti, pasti itu, tidak bisa kita hindari. Karena apa? Kita belum siap. Katakanlah tiba-tiba impor kedelai kita putus. Kita tidak boleh lagi mengimpor kedelai. Petani, sekarang sudah tidak lagi mengenal tanaman kedelai. Lalu bagaimana caranya? Jadi memang perlu waktu step by step, sudah barang tentu, spot ke petani harus ditingkatkan, misalnya tadi seperti yang Korea lakukan, memberikan subsidi langsung ke petani, bukan subsidi pupuk ataupun lainnya, tapi subsidi harga di produk akhir, ini diberi harga yang lebih tinggi oleh pemerintah atau petani diberi tambahan terkait dengan harga produk yang mereka produksi, sehingga petani akan menjadi bergairah. Dan perlahan-lahan seperti itu, maka untuk komoditas-komoditas sasaran yang ingin kita swasembadakan, perlahan-lahan bisa tercapai. Tapi kalau tidak, kalau tidak ada pengaturan terkait dengan impor, misalnya tadi tarif, ya jawabannya juga sudah pasti, pasti gagal program swasembada tersebut. Dan ini terjadi di semua komoditas. Kedelai tahun 2017 dicanangkan dalam dua tahun swasembada, ternyata gagal. Bawang putih pada saat itu dalam dua tahun swasembada, impor bawang putih malah melonjak. Jadi itu yang terjadi, karena tidak ada satu keseragaman dalam kebijakan terkait dengan perlindungan petani.

Lalu kemudian, Pak Arsul, terkait dengan penurunan rumah tangga petani. Pemerintah sudah melanjutkan ... meneruskan kebijakan yang disebut sebagai Reforma Agraria. Kebetulan teman saya pada saat waktu membantu SBY sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional, lalu kemudian dia menelurkan dua program pada saat itu yang disebut sebagai Agrarian Reform.

Agrarian Reform itu dimaknainya ada dua. Yang pertama adalah Akses Reform. Akses Reform ini ditempuh melalui apa? Melalui bagi-bagi sertifikat. Sehingga nanti harga tanah naik. Teman-teman di jaringan lain mengingatkan kalau itu ditempuh, maka yang terjadi justru pelepasan tanah yang semakin besar. Karena ketika harga tanah naik, dia hanya punya tanah sempit, dijual saja, ini masalahnya. Jadi Akses Reform pada saat itu dilaksanakan besar-besaran pada masa SBY. Lalu kemudian ada yang kedua, Asset Reform. Asset Reform adalah pembagian tanah untuk petani. Dan ini tidak berjalan. Pada saat di tim transisi, saya membantu Presiden Jokowi untuk merancang terkait Reforma Agraria karena pada saat itu, ada 9.000.000 lahan yang kami hitung yang bisa dikeluarkan dan digunakan untuk petani. Tapi ternyata tidak jalan juga. Jadi ini

sangat tergantung kepada bagaimana terkait dengan pemerintah sudah barang tentu.

Lalu terkait dengan food estate. Dan ini juga kadang-kadang pernyataan saya juga membikin banyak orang tidak menyukai. Karena apa, kebetulan tahun 1996 saya terlibat sebagai anggota analisis ... tim risiko analisis terkait dengan food estate yang pertama kali. Gambut 1.000.000 hektare, jadi itu. Dan ceritanya tahun 1998 sudah didatangkan 15.000 petani di sana. Tahun 1999, proyek tersebut dihentikan dan diadakan reklamasi. Karena memang praktis tidak menghasilkan apa pun.

Lalu pada masa SBY, ada beberapa food estate. Yang pertama kita tahu MIFEE, Merauke Integrated Food and Energy Estate Tahun 2008. Hasilnya apa? Hasilnya gagal. Ada dua lagi food estate. Yang satu di Ketapang, seluas 100.000 hektare dan di Bulungan 300.000 hektare pada masa SBY. Hasilnya apa? Gagal.

Lalu kemudian di awal pemerintahan Jokowi, mencanangkan rice estate di Merauke seluas 1.200.000 hektare. Hasilnya apa? Kita tahu persis. Gagal juga. Dan sekarang kita balik lagi ke food estate. Dan kita sudah menghamburkan dana puluhan triliun rupiah untuk itu, for nothing. Itu saja terkait dengan food estate.

Lalu, Prof. Saldi. Lalu bagaimana mempertemukan kedua titik tersebut? Prof. Saldi, antara penyediaan pangan yang terjangkau oleh masyarakat. Dan yang kedua, yang menguntungkan petani. Pas saat itu, sudah agak lama saya diundang salah satu kantor di pemerintahan pada saat itu, rapat di pimpin Prof. Emil Salim, lalu kemudian teman-teman ekonom, ada ekonomi UI, dan lain sebagainya menyampaikan itu, sama persis yang disampaikan. Bagaimana kita menetapkan satu harga yang menguntungkan bagi petani dan juga tidak merugikan bagi konsumen? Pas saat itu Prof. Emil Salim sampaikan ... karena saya pada saat itu tetap harus ke petani. Sasaran kita adalah ke petani pada saat itu, perlindungan ke petani. Prof. Emil Salim bilang ke teman-teman ekonom dari berbagai universitas, "Anda melupakan prinsip dasar ekonomi semester 1." Karena apa? Tidak akan mungkin harga itu ada. Tidak akan mungkin. Di situ, pemerintah dituntut pembelaan ke mana? Pembelaan ke konsumen atau ke produsen? Jawabannya hanya sederhana itu. Kalau pembelaan ke produsen, ya sudah, kita harus menerima harga yang lebih tinggi. Kalau pembelaan ke konsumen sudah, impor saja, selesai. Jadi, tidak ada satu harga yang akan betul-betul menguntungkan bagi kedua pihak tersebut.

Nah, lalu apa? Di berbagai negara yang lain yang dilakukan apa? Ya, supaya harga di tingkat konsumen bisa terjangkau, ada subsidi langsung bagi petani, itu. Pemerintah menetapkan harga tertentu yang menguntungkan petani pada kondisi apapun, sehingga kalau petani merugi, maka petani akan mendapatkan ... apa ... kerugian tersebut ditanggung oleh pemerintah. Itu yang terjadi.

Terima kasih, mohon maaf.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:10:27]

Baik, terima kasih.

50. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025: DWI ANDREAS SANTOSA [01:10:28]

Pak Suhartoyo, terkait dengan jawaban-jawaban saya yang cukup panjang.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:10:32]

Baik, Prof, terima kasih.
Untuk Pemohon 203, sudah cukup Ahlinya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:10:37]

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:10:38]

213, masih akan mengajukan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:10:39]

213 akan mengajukan 2 ahli dan insha Allah 2 saksi, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:10:46]

Baik. Dijadwalkan Rabu, tanggal 22 April 2026, pukul 10.30 WIB. Keterangan dan CV-nya supaya diserahkan kepada Mahkamah selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan.

Terima kasih untuk Prof. Dwi Andreas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami, dalam Majelis mengambil atau mempertimbangkan permohonan ini. Dan terima kasih juga untuk semua, DPR dan Presiden atas Persidangan siang hari ini.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.39 WIB

Jakarta, 7 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

